



**SUMBER BERITA**

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU		.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

**Jaksa *Deadline* Akhir Tahun Kembalikan KN**

**SELUMA** - Kejari Seluma memberikan tenggat waktu terakhir (*deadline*) kepada enam kontraktor rekanan Dinas PUPR Seluma yang belum mengembalikan kerugian negara (KN) atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2018. Paling lama akhir tahun 2019 pengembalian KN sudah tuntas. Kalau tidak maka masalah ini akan diproses secara hukum.

Sebagaimana diketahui dari total temuan sebesar Rp 1,1 miliar dalam realisasi beberapa item kegiatan di Dinas PUPR Seluma, telah dikembalikan Rp 756 juta. Masih tersisa Rp 344 juta yang belum dikembalikan pihak rekanan PUPR Seluma.

Kajari Seluma M. Ali Akbar, SH, MH melalui Kasi Intel, Citra Apriadi, SH, MH mengatakan, ada 10 rekanan yang

terlibat. Baru empat yang telah menuntaskan pengembalian KN. Sedangkan enam kontraktor lainnya baru menyicil. "Enam kontraktor ini sudah kami panggil. Mereka sudah membuat surat pernyataan untuk melunasi yang batasannya kita berikan hingga akhir tahun ini," kata Citra.

Bila hingga batas waktu yang sudah ditetapkan, KN belum juga diselesaikan dikembalikan, Citra memastikan pihaknya akan memproses hukum kontraktor nakal itu. "Kami berharap semua kooperatif. Segera lah kembalikan temuan tersebut. Karena kami tidak akan mentolerir kontraktor yang hingga batas waktu pengembalian belum melunasi. Maka jangan salahkan kami, perkara ini kami proses hukum," tegas Citra.

Terpisah, Inspektur Inspek-

torat Seluma, Drs. Ramlan Fahmi mengatakan dari hasil audit BPK RI tahun 2018 terdapat temuan di enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Seluma. Selain Dinas PUPR, juga ada di Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) dengan temuan Rp 24 juta. Lalu Dinas Kominfo Rp 25 juta. Sekretariat DPRD Rp 1,6 miliar. BKPSDM sebesar Rp 60 juta dan RSUD Tais Rp 84 juta.

Dari enam OPD ini hanya Dinas PUPR dan Sekretariat DPRD Seluma yang belum melunasi. Untuk Dinas PUPR sudah mengembalikan Rp 756 juta dan Sekretariat DPRD Seluma mengembalikan sebesar Rp 456 juta. "Sehingga total KN yang belum dikembalikan ke kas daerah dari dua OPD ini mencapai Rp 1,488 miliar," demikian Ramlan. (aba)